

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Akuntansi itu sendiri seringkali diartikan sebagai bahasa perusahaan yang berfungsi sebagai pemberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan guna dalam pengambilan sebuah keputusan. Suatu perusahaan memerlukan adanya informasi tentang perusahaannya, dimana informasi itu mengenai informasi nilai perusahaan dan informasi tentang laba/rugi usaha. Kedua buah informasi tersebut berguna untuk mengetahui jumlah besaran modal yang dimiliki perusahaan dan juga untuk mengetahui perkembangan maju mundurnya suatu perusahaan. Serta dapat digunakan sebagai dasar untuk perhitungan dalam pembayaran pajak dan memberikan informasi tentang keadaan perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain. Fungsi lain adalah sebagai penarik investor, untuk menanamkan saham jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas.

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu pemerintah daerah. Dimana informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaiannya dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia sudah mencanangkan reformasi dibidang akuntansi, sehingga seluruh instansi pemerintah yang ada diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,

akan tetapi tidak semua instansi pemerintah siap untuk menyusun sebuah laporan keuangan berbasis akrual. Sehingga pemerintah pusat memberikan waktu agar setiap instansi pemerintah yang adaguna mempersiapkan diri untuk mematuhi peraturan pemerintah. Hal tersebut telah dituangkan dalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 36 (ayat 1). Selama instansi belum dapat menggunakan basis akrual penuh untuk system keuangan yang digunakan maka instansi tersebut dapat menggunakan basis kasebagai acuan pengelolaan keuangan mereka.

Secara spesifik penggunaan basis akrual sangat bermanfaat untuk pemerintah karena dapat mengevaluai kinerja pemerintah secara lebih spesifik terkait biaya jasa pelayanan dan efisiensi serta pencapaian tujuan. Serta pemerintah dapat mengetahui kemampuan pendanaan untuk setiap program yang

dijalankan. Dengan pelaporan berbasis akrual pengguna dapat mengetahui laporan posisi keuangan dan perubahannya secara akurat. Penggunaan basis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengetahui potensi penggunaan sumber daya di masa depan.

Pada reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang sangat signifikan adalah perubahan pada bidang akuntansi pemerintahan. Dimana perubahan di bidang akuntansi pemerintahan sangatlah penting sebab melalui proses akuntansi dihasilkan informasi tentang keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai tujuan masing-masing. Karena begitu eratnya hubungan antara keterkaitan keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan bermacam - macam kendala sehingga sepenuhnya mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan (Simajuntak, 2010).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual menghasilkan perubahan yang cukup besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan dapat memperbaiki kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang lebih akurat dalam menilai kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah dapat membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan pendanaannya, lebih memungkinkan menggunakan laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya, serta

lebih ril dalam memaparkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat dengan lebih memberikan suatu kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengolahan sumber daya yang dikelolanya dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya (Widyastuti, 2015).

Padasaatini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lumajang belum menggunakan basis akrual sepenuhnya. Sehingga sebagian besar instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Lumajang masih menggunakan basis kasmenuju akrual dalam transaksi ekonomi yang dikerjakan di setiap instansi pemerintah, hal ini dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan sistem anggaran dalam pengelolaan keuangannya. Hal tersebut dapat terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyandingkan antara anggaran dan realisasinya sebagai pembandingan. Sehingga dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) hanya terlihat pencapaian realisasi tahun berjalan saja dan memisahkan hak dan kewajiban yang seharusnya realisasi tahun sebelumnya atau tahun selanjutnya. Akan pada setiap Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca yang disusun dalam Laporan Keuangan telah memisahkan antara hak dan kewajiban sesuai waktu kapan hak dan kewajiban tersebut seharusnya diterima, atau dengan kata lain LO, LPE dan Neraca telah memakai basis akrual sebagai mana acuan penyusunannya.

Dalam PP No.71 Tahun 2010 disebut dalam pasal 4 ayat 1 yang disebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Hal

ini berarti seluruh entitas pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual pada pelaksanaan pengelolaan keuangannya. Dalam konteks ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengacu pada peraturan ini. Sehingga setiap OPD yang ada di daerah harus menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Dimana setiap OPD melakukan belanja berdasarkan pada pendapatan yang diterima. Dimana sebelum OPD menerapkan basis akrual piutang dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan. Begitu pula dengan belanja, utang belanja dicatat sebagai belanja tahun berjalan. Akan tetapi ketika OPD berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menggunakan basis akrual sepenuhnya adalah pelaksanaan transaksi keuangan yang ada, maka OPD harus memisahkan hak dan kewajiban berdasarkan waktu yang seharusnya transaksi dilakukan.

Pada lain sisi ketika instansi pemerintah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual penuh atau dengan kata lain berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka instansi tersebut harus membuat dua laporan tambahan selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yakni Laporan Arus Kas (LAK) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Selama ini instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Lumajang hanya menyusun 5 (lima) laporan selain Laporan Arus Kas (LAK) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam setiap penerapan kebijakan pemerintah memiliki dampak yang akan mempengaruhi kinerja suatu instansi yang menerapkannya.

Demikian jugalahnya dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di lingkungan Pemerintahan Negara Indonesia. Begitu pula dengan instansi yang ada di Kabupaten Lumajang pasti memiliki dampak terhadap kinerja yang ada. Pada saat ini instansi yang ada di Kabupaten Lumajang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akuntansi riel yang memiliki dampak terhadap pengelolaan keuangannya. Dimana setiap instansi harus menyusun Rencana Kerja Anggaran, dimana penyusunannya didasarkan pada pagu anggaran yang diberikan kepada masing – masing instansi dengan besaran nilai yang berbedadesuaikan dengan proporsi urgensi yang dilakukan. Dalam penggunaan basis kas menuju akuntansi riel ini instansi juga tidak perlu menyusun Laporan Arus Kas (LAK).

Dalam penyusunan laporan keuangan menuju akuntansi riel makainstansi yang bersangkutan harus menyusun laporan arus kas dan rencana bisnis anggaran. Didalam suatu Laporan Arus Kas (LAK) terdapat tiga komponen yang sangat penting yaitu arus kas dari kegiatan operasi (*cash flows from operating activities*), arus kas dari kegiatan investasi, (*cash flows from investing activities*), arus kas dari kegiatan pendanaan (*cash flows from financing activities*). Didalam laporan keuangan basis akuntansi riel penuh juga harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran, yang didalamnya berisi rencana jangka pendek satu tahun dan sebagai implementasi rencana jangka panjang lima tahun yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi Bisnis.

Mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Lumajang juga akan

menerapkan standarsesuai yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas penulis mengajukan judul penelitian “ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS PENANGGAL DALAM PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010”.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian yaitu menganalisis penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Puskesmas Penanggal dalam Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Penanggal.

1.3. Rumusan Masalah

Apakah penyajian laporan keuangan Puskesmas Penanggal sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk menilai kesesuaian pengujian laporan keuangan Puskesmas Penanggal dengan PP No. 71 tahun 2010

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk mahasiswa

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan pihak lain mengenai penyajian laporan keuangan sesuai peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010.

2. Manfaat untuk pihak Puskesmas Penanggal dan sejenis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap Puskesmas Penanggal dan instansi sebagai referensi dalam membuat laporan

an keuangan berbasis akrual penuh dan dapat menyajikan laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

